1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan ibukotanya Surabaya. Surabaya sendiri selain dikenal sebagai kota pahlawan, juga merupakan kota terbesar no.2 di Indonesia. Sebagai kota terbesar no.2 di Indonesia, Surabaya telah banyak mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang seperti ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan industri. Perkembangan yang pesat ini disebabkan oleh semakin luasnya hubungan Jawa Timur dengan dunia internasional baik dalam hubungan bisnis, sosial, dan budaya. Hubungan antara Surabaya dengan dunia internasional yang semakin baik dan luas ini mempunyai dampak positif, antara lain banyaknya masyarakat Surabaya melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk kepentingan bisnis, bertamasya maupun bersekolah di luar negeri. Untuk melakukan perjalanan ke luar negeri diperlukan persyaratan yaitu seorang harus mempunyai paspor dan harus membayar fiskal. Fiskal adalah biaya yang harus dibayar oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal inilah yang memberatkan warga negara Indonesia ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Beberapa waktu yang lalu masyarakat mengusulkan penghapusan terhadap kebijakan fiskal, khususnya untuk bepergian ke negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Isu-isu tersebut ditanggapi secara positif maupun negatif oleh masyarakat. Kebanyakan bisnis pariwisata menanggapi bahwa dengan dihapuskannya fiskal akan membuat kepariwisataan domestik terpuruk. Bahkan pemerintah akan kehilangan pajak pendapatan. Ditengah isu yang simpang siur, beberapa waktu yang lalu pemerintah yang diwakili Menteri Kepariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik secara tegas mengatakan pemerintah tidak akan menghapuskan kebijakan fiskal (<http://www.indonesianembassy...>). Namun demikian Penulis tetap melakukan survey untuk menjaring tanggapan pelaku pariwisata Surabaya seandainya kebijakan fiskal dihapuskan.

1.2. Rumusan Pelaporan

Penulis ingin melaporkan: Tanggapan Pelaku Pariwisata Surabaya bila penghapusan kebijakan Fiskal Luar Negeri di Indonesia diberlakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan pelaku Pariwisata Surabaya apabila dihapuskannya kebijakan fiskal luar negeri dihapuskan. Penulis juga ingin melihat manfaatnya bagi:

- Pemerintah: Sebagai masukan untuk meninjau kembali tentang kebijakan fiskal serta menyusun langkah-langkah yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata.
- Pelaku Pariwisata: Sebagai masukan dalam menyusun strategi kerja, dalam mencari peluang pangsa pasar baru di masa mendatang agar lebih berinovasi dalam menarik baik wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke Indonesia.

1.4. Lingkup Pembahasan

Di dalam laporan ini penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai tanggapan pelaku pariwisata terhadap isu-isu penghapusan fiskal luar negeri di Indonesia. Yang dimaksud pelaku pariwisata adalah orang-orang yang bekerja di Industri Pariwisata, Pendidikan Kepariwisata, Asosiasi pariwisata, dan badan Pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata. Penulis membagi menjadi menjadi 2 sektor:

a. Sektor swasta:

Komponen utama dalam Industri Pariwisata:

- Biro Perjalanan Wisata.
- Transportasi dan Airlines.
- Hotel.

b. Sektor Pemerintah dan Institusi Pendidikan:

- Pemerintahan dan Asosiasi Kepariwisata
- Sekolah tinggi kepariwisataan.

1.5. Metode Pelaporan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan pelaku pariwisata mengenai penghapusan fiskal dan dampak penghapusan fiskal tersebut terhadap industri pariwisata dalam negeri, penulis telah mempersiapkan metode pelaporan mulai dari pengumpulan informasi dan data pendukung sampai dengan cara pengolahan data yang akan dijabarkan seperti di bawah ini.

1.5.1. Jenis Pengumpulan Data

Ada dua jenis data, yang pertama yaitu data Kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka atau data yang berupa kata-kata (Kusmayadi, h. 80). Data yang diperlukan untuk data Kualitatif adalah data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan 20 orang pelaku pariwisata, yaitu orang-orang yang mewakili berbagai unsur industri pariwisata maupun badan-badan terkait seperti, Pimpinan dari Travel Agent, Hotel, Airlines, Transport, Akomodasi bidang pariwisata, Sekolah kepariwisataan, Pemerintahan. Sedangkan data Kuantitatif adalah hasil tabulasi dari pengelompokan jawaban responden dalam wawancara yang dinyatakan dalam angka.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data ini yang diperoleh oleh penulis adalah Data Primer yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan 20 responden pelaku pariwisata. Pemilihan responden mengikuti cara *purposive sampling* (Kusmayadi, h. 141) yaitu responden ditetapkan atas pertimbangan sesuai dengan tujuan survei. Keterlibatan responden pada dunia pariwisata pada awalnya diharapkan responden berimbang diantara lima unsur lima diatas yaitu: BPW, Hotel, Airlines, Pemerintah dan Asosiasi, namun pada kenyataannya penulis mendapat beberapa kendala dalam mewawancarai ketua ASITA dan juga Pemerintah. Maka akhirnya sebagian besar responden adalah orang-orang dari BPW, Airlines, dan Hotel yang cukup terkemuka di Surabaya. Daftar responden terdapat di lampiran. Besar jumlah sampel untuk masing-masing sektor tergantung dari kesediaan responden.

Untuk mendapatkan kedalaman Informasi sebagai bahan pendukung data maka penulis juga melakukan wawancara. Adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, artinya Penulis telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.

1.6. Kerangka Pelaporan

Laporan ini akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

- Bab 1 : Bab pertama ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan laporan, manfaat laporan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data dan kerangka pembahasan.
- Bab 2 : Bab ini akan berisi teori mengenai fiskal dan penulis menggunakan ketentuan dasar pajak penghasilan serta tanggapan tokoh-tokoh Pariwisata mengenai asumsi penghapusan fiskal luar negeri.
- Bab 3 : Bab ini akan berisi hasil laporan berupa tabel dari wawancara mengenai bagaimana tanggapan pelaku pariwisata terhadap penghapusan kebijakan fiskal di Indonesia.
- Bab 4 : Bab ini akan merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari tanggapan pelaku pariwisata mengenai penghapusan kebijakan fiskal, serta saran-saran yang berguna untuk semua pihak yang terkait dalam industri pariwisata.